

Kolaborasi Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam Pengabdian Masyarakat Berbasis SDGs

Tri Dava Kurniawan¹, Nayif Achmad Fannur², Firre An Suprpto³, Indah Prabawati⁴

¹ Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

² Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

³ Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

⁴ Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Corresponding Author:

Tri Dava Kurniawan, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: 25040674155@mhs.unesa.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of collaboration between government entities and higher education institutions in community service programs and its contribution toward achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 4 (Quality Education) and SDG 17 (Partnerships for the Goals). The central problem is the persistently low effectiveness of such collaboration, evidenced by institutional role disparities, policy-practice misalignments, and limited program sustainability. A quantitative descriptive method was employed by systematically analyzing 45 community service program reports published in accredited journals between 2019 and 2025. Data were gathered through structured coding sheets and processed using descriptive statistics. Results reveal a mean collaboration effectiveness score of 3.2 (moderate category). The widest gaps were recorded in role equality (2.9) and post-assistance program sustainability (2.7). While 73% of programs improved short-term technical capacity, only 31% produced lasting economic independence outcomes. The study concludes that a paradigm shift is necessary moving from top-down interventions toward a participatory pentahelix collaboration model that integrates digital technology and social capital reinforcement.

Keywords: Collaboration, Government, Higher Education, Community Service, SDGs

Abstrak

Studi ini mengkaji implementasi kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat, serta relevansinya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) utamanya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Tujuan). Rendahnya efektivitas kolaborasi menjadi persoalan sentral yang ditandai oleh ketimpangan peran kelembagaan, ketidakselarasan kebijakan dengan realitas lapangan, serta minimnya keberlanjutan dampak program. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menganalisis 45 laporan program pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi periode 2019-2025. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen lembar koding dan selanjutnya dianalisis secara statistik deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa skor rata-rata efektivitas kolaborasi berada pada angka 3,2 (kategori sedang). Kesenjangan paling signifikan ditemukan pada dimensi kesetaraan peran (2,9) dan keberlanjutan program pasca-pendampingan (2,7).

Meskipun 73% program mampu meningkatkan kapasitas teknis masyarakat dalam jangka pendek, hanya 31% yang berhasil mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan transformasi paradigmatis dari pendekatan top-down menuju model kolaborasi partisipatif berbasis pentahelix, yang mengintegrasikan digitalisasi dan penguatan modal sosial sebagai pilar keberlanjutan.

Kata kunci: Kolaborasi, Pemerintah, Perguruan Tinggi, Pengabdian Masyarakat, SDGs

PENDAHULUAN

Dalam tatanan sosial kontemporer, perguruan tinggi tidak lagi dapat membatasi diri sebagai institusi yang berfungsi sebagai pusat produksi ilmu pengetahuan dan pengembangan teori semata. Perubahan paradigma pembangunan yang menekankan kolaborasi multipihak telah mendorong perguruan tinggi untuk mengambil peran yang lebih luas sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) sekaligus katalisator pembangunan masyarakat. Melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, institusi pendidikan tinggi dituntut mampu mentransformasikan hasil kajian akademik menjadi solusi nyata terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan yang dihadapi masyarakat. Rahmawati *et al.* (2024) menegaskan bahwa keberhasilan perguruan tinggi pada era modern tidak hanya diukur dari kualitas lulusan maupun produktivitas publikasi ilmiah, tetapi juga dari sejauh mana kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Tuntutan tersebut semakin relevan seiring dengan implementasi agenda pembangunan global Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2015. Dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan, perguruan tinggi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pencapaian SDG 4 tentang *Quality Education* dan SDG 17 tentang *Partnerships for the Goals*. SDG 4 menekankan pentingnya penyediaan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, sedangkan SDG 17 menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Siahaan *et al.* (2023) menjelaskan bahwa perguruan tinggi menjadi salah satu aktor strategis yang memiliki kapasitas intelektual, sumber daya manusia, serta jaringan kelembagaan yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal. Oleh karena itu, program pengabdian kepada masyarakat tidak lagi dipandang sebagai aktivitas insidental, melainkan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat pembangunan berbasis kolaborasi.

Di Indonesia, berbagai kebijakan pemerintah telah memberikan ruang yang semakin luas bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui berbagai program, seperti Kampus Merdeka, Kuliah Kerja Nyata (KKN), desa binaan, inkubasi usaha masyarakat, pemberdayaan UMKM, hingga pendampingan

desa digital. Berbagai program tersebut dirancang agar mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat sekaligus menghasilkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan lokal. Namun demikian, implementasi berbagai program tersebut masih menunjukkan sejumlah permasalahan yang cukup kompleks. Tidak sedikit kegiatan pengabdian yang berorientasi pada pemenuhan indikator kinerja perguruan tinggi tanpa didukung analisis kebutuhan masyarakat secara mendalam. Akibatnya, banyak program berhenti setelah pendanaan selesai, tanpa mekanisme keberlanjutan yang mampu menjaga manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program pengabdian masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antaraktor yang terlibat. Dalam praktiknya, sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, sektor swasta, maupun organisasi sosial masih sering berjalan secara parsial. Setiap lembaga cenderung menjalankan program berdasarkan kepentingan institusional masing-masing sehingga terjadi tumpang tindih kegiatan, lemahnya koordinasi, serta kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan banyak potensi kolaborasi yang seharusnya dapat menghasilkan dampak pembangunan yang lebih besar justru belum dimanfaatkan secara maksimal.

Qorib (2024) mengidentifikasi bahwa kolaborasi antara universitas dan masyarakat di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Hambatan tersebut meliputi adanya kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan orientasi akademik perguruan tinggi, lemahnya komunikasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan pendanaan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, hingga belum adanya sistem evaluasi bersama yang mampu mengukur dampak program secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum sepenuhnya menerapkan prinsip partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Masyarakat sering kali hanya menjadi objek pelaksanaan program sehingga keberlanjutan kegiatan menjadi sulit diwujudkan setelah program selesai dilaksanakan.

Permasalahan yang hampir serupa juga ditemukan pada implementasi program magang mahasiswa di berbagai instansi pemerintah. Kusnadi *et al.* (2022) menjelaskan bahwa masih terdapat berbagai kendala berupa kesulitan adaptasi mahasiswa terhadap budaya kerja birokrasi, ketidaksesuaian antara bidang keilmuan dengan penempatan magang, keterbatasan pendampingan, hingga rendahnya koordinasi antara perguruan tinggi dan instansi mitra. Berbagai hambatan tersebut menyebabkan tujuan program sebagai media pembelajaran sekaligus sarana pemberdayaan belum tercapai secara optimal. Akibatnya, manfaat program lebih banyak dirasakan pada aspek administratif dibandingkan peningkatan kapasitas institusi maupun masyarakat.

Secara konseptual, pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor telah lama dijelaskan melalui teori *Triple Helix* yang dikembangkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000). Teori ini menempatkan perguruan tinggi, pemerintah, dan industri sebagai tiga aktor utama dalam membangun ekosistem inovasi yang saling berinteraksi dan saling memperkuat. Perguruan tinggi berperan menghasilkan pengetahuan dan inovasi, pemerintah berfungsi sebagai regulator sekaligus fasilitator kebijakan, sedangkan sektor industri berkontribusi dalam penyediaan sumber daya, investasi, dan hilirisasi inovasi. Mukhlis (2018) menjelaskan bahwa dalam model *Triple Helix III*, hubungan ketiga aktor tersebut bersifat lebih fleksibel, setara, dan independen sehingga memungkinkan terciptanya inovasi secara kolaboratif tanpa adanya dominasi salah satu pihak.

Perkembangan teori tersebut kemudian melahirkan konsep *Quadruple Helix* yang memasukkan masyarakat sebagai aktor penting dalam proses inovasi, bahkan berkembang menjadi konsep *Pentahelix* dengan menambahkan unsur media sebagai penghubung informasi, komunikasi publik, serta pembentukan opini masyarakat. Menurut Lestarningsih dan Chrismartin (2025), model *Pentahelix* menjadi pendekatan yang lebih relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan modern karena mampu mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Namun demikian, implementasi model tersebut di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Hubungan antaraktor masih bersifat sektoral, insidental, dan belum didukung mekanisme koordinasi yang sistematis sehingga kolaborasi sering kali berhenti pada tahap seremonial tanpa menghasilkan inovasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan publik, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap literasi digital membuka peluang baru dalam pengembangan model pengabdian kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses edukasi, pendampingan, monitoring, hingga evaluasi program dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, integrasi nilai-nilai religius dalam berbagai program pemberdayaan juga menjadi aspek penting, khususnya pada masyarakat Indonesia yang memiliki karakter sosial-keagamaan yang kuat. Firjatullah *et al.* (2026) membuktikan bahwa integrasi program edukasi dengan penguatan nilai-nilai religius mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara lebih holistik, tidak hanya pada aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada dimensi moral, etika, dan karakter sosial masyarakat.

Berbagai program seperti Kampus Merdeka, desa binaan, maupun pemberdayaan berbasis komunitas menunjukkan bahwa kolaborasi yang dirancang secara partisipatif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemandirian masyarakat melalui penguatan modal sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Mesra (2026) menjelaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program sehingga keberlanjutan kegiatan menjadi lebih terjamin. Namun

demikian, hasil penelitian Sururi *et al.* (2022) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh perguruan tinggi masih didominasi pada perubahan jangka pendek, seperti peningkatan kualitas proses dan perubahan perilaku kelompok sasaran. Dampak yang bersifat struktural dan berkelanjutan masih relatif rendah karena lemahnya sinergi antaraktor serta belum adanya model kolaborasi yang mampu mengintegrasikan seluruh potensi yang tersedia.

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan utama pengabdian kepada masyarakat saat ini bukan lagi terletak pada kurangnya jumlah program yang dilaksanakan, melainkan pada bagaimana membangun strategi kolaborasi yang mampu menyatukan kepentingan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam satu kerangka pembangunan yang partisipatif, adaptif, serta berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis strategi kolaborasi partisipatif yang mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan implementasi di lapangan, mengintegrasikan dimensi edukasi, religiusitas, dan teknologi informasi, sekaligus memetakan berbagai peluang serta hambatan yang memengaruhi efektivitas program pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam membangun model kemitraan yang lebih efektif, inovatif, dan berorientasi pada percepatan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan karakteristik fenomena secara sistematis berdasarkan data terukur. Populasi mencakup seluruh laporan program pengabdian masyarakat hasil kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi di Indonesia yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi rentang 2019–2025. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, menghasilkan 45 artikel yang memenuhi tiga kriteria utama: (1) secara eksplisit membahas kolaborasi antarlembaga; (2) menyajikan data kuantitatif atau kualitatif yang dapat dikuantifikasi; serta (3) mencakup beragam sektor seperti pertanian, perikanan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Instrumen pengumpulan data berupa lembar koding yang dirancang untuk mengekstrak informasi meliputi jenis program, aktor yang terlibat, indikator keberhasilan, skala dampak, dan tantangan yang dihadapi. Analisis dilakukan dengan statistik deskriptif mencakup frekuensi, persentase, mean, dan standar deviasi. Interpretasi skor menggunakan skala 1–5 (sangat rendah hingga sangat tinggi). Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi, serta dikaitkan dengan kerangka teori kolaborasi dan indikator SDGs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi Kolaborasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap 45 artikel yang menjadi sampel penelitian, diperoleh rata-rata skor efektivitas implementasi kolaborasi sebesar 3,2, yang berada pada kategori sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya mampu menghasilkan dampak yang optimal dan berkelanjutan. Keberhasilan kolaborasi lebih banyak terlihat pada aspek pelaksanaan program dan perubahan jangka pendek yang dialami oleh kelompok sasaran, sedangkan aspek kelembagaan, kesetaraan kemitraan, dan keberlanjutan program masih memerlukan penguatan yang lebih sistematis. Distribusi skor efektivitas berdasarkan indikator disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-rata Skor Efektivitas Kolaborasi per Indikator

No	Indikator	Rata-rata	Kategori
1	Perubahan kelompok sasaran	3,8	Tinggi
2	Kualitas proses implementasi	3,6	Tinggi
3	Transparansi dan akuntabilitas	3,4	Sedang
4	Kesetaraan peran antarlembaga	2,9	Sedang
5	Keberlanjutan program pasca-pendampingan	2,7	Sedang
6	Rata-rata keseluruhan	3,2	Sedang

Sumber: Data diolah dari 45 artikel sampel (2025)

Indikator dengan nilai tertinggi adalah perubahan kelompok sasaran (3,8). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar program kolaboratif berhasil meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, perubahan perilaku, maupun tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya pengembangan potensi lokal. Program-program pengabdian yang berorientasi pada pelatihan, penyuluhan, pendampingan UMKM, penguatan kelembagaan desa, maupun peningkatan literasi digital umumnya mampu menghasilkan perubahan yang cukup nyata selama proses implementasi berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi telah menjalankan fungsi transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) kepada masyarakat secara relatif efektif.

Indikator kualitas proses implementasi juga memperoleh skor tinggi (3,6). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar program telah dirancang melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang cukup sistematis. Berbagai artikel menunjukkan bahwa keterlibatan dosen, mahasiswa, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan mampu meningkatkan efektivitas penyampaian program. Kolaborasi lintas disiplin ilmu juga memperkaya pendekatan penyelesaian masalah sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih komprehensif. Selain itu, keberadaan program seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kampus Merdeka,

Desa Binaan, maupun Matching Fund memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk menerapkan hasil penelitian secara langsung di tengah masyarakat.

Meskipun demikian, indikator transparansi dan akuntabilitas masih memperoleh kategori sedang dengan skor rata-rata 3,4. Sebagian besar artikel menjelaskan adanya mekanisme pelaporan kegiatan, namun belum banyak yang menyajikan sistem dokumentasi, pelaporan keuangan, maupun indikator keberhasilan yang terukur dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Transparansi masih lebih banyak difokuskan pada penyampaian hasil kegiatan dibandingkan penyediaan informasi mengenai proses pengambilan keputusan, distribusi sumber daya, serta evaluasi keberhasilan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaborasi masih memerlukan penguatan melalui penerapan prinsip *good governance*, terutama dalam aspek keterbukaan informasi, akuntabilitas publik, dan evaluasi berbasis data.

Aspek yang memperoleh nilai relatif rendah adalah kesetaraan peran antarlembaga dengan skor 2,9. Hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta masih belum berjalan secara seimbang. Dalam banyak kasus, perguruan tinggi masih menjadi aktor dominan dalam proses perencanaan, penentuan program, hingga evaluasi kegiatan. Masyarakat sering kali hanya berperan sebagai penerima manfaat (*beneficiary*), bukan sebagai mitra yang memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan arah pembangunan. Padahal, konsep kolaborasi modern menempatkan seluruh aktor sebagai subjek yang memiliki kapasitas, pengalaman, serta pengetahuan lokal yang saling melengkapi.

Indikator dengan skor terendah adalah keberlanjutan program pasca-pendampingan sebesar 2,7. Rendahnya skor tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan setelah pendampingan selesai dilaksanakan. Banyak kegiatan yang berhenti ketika dukungan pendanaan berakhir atau ketika tim pengabdian telah menyelesaikan masa pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi jangka pendek belum sepenuhnya diikuti oleh pembentukan kelembagaan masyarakat yang mandiri maupun sistem pendampingan yang berkelanjutan.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sururi *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa dimensi perubahan kelompok sasaran dan mutu proses implementasi telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sementara aspek keberlanjutan program masih menjadi kelemahan utama dalam implementasi pengabdian masyarakat. Berdasarkan hasil sintesis terhadap artikel yang dianalisis, hanya sekitar 31% program yang melaporkan dampak nyata terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sebaliknya, 69% program hanya menghasilkan perubahan selama kegiatan berlangsung tanpa adanya mekanisme lanjutan yang mampu menjaga keberhasilan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar program masih berorientasi pada pencapaian

luaran jangka pendek, seperti jumlah peserta, jumlah pelatihan, atau publikasi ilmiah, dibandingkan transformasi sosial yang bersifat berkelanjutan.

Salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah formulasi kebijakan yang masih didominasi pendekatan top-down, di mana desain program lebih banyak ditentukan oleh perguruan tinggi atau pemerintah dibandingkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, beberapa program tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya lokal sehingga tingkat adopsi inovasi oleh masyarakat menjadi relatif rendah. Padahal, berbagai kajian mengenai pembangunan partisipatif menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah hingga evaluasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu program pemberdayaan.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Mayrudin *et al.* (2024) mengenai program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pandeglang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelatihan penggunaan platform *marketplace* berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan digital peserta secara signifikan. Namun demikian, peningkatan kapasitas tersebut belum secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan ekonomi karena setelah program selesai masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap modal usaha, pendampingan bisnis, pemasaran digital, maupun jaringan distribusi produk. Dengan demikian, keberhasilan transfer pengetahuan perlu diikuti dengan pembangunan ekosistem usaha yang mendukung agar manfaat program dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)

Analisis terhadap 45 artikel menunjukkan bahwa 82% penelitian secara eksplisit mengaitkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Temuan ini mengindikasikan meningkatnya kesadaran akademisi bahwa pengabdian masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung agenda pembangunan global. SDGs menjadi kerangka yang mampu menghubungkan aktivitas lokal dengan target pembangunan internasional sehingga hasil pengabdian memiliki relevansi yang lebih luas. Sebagian besar artikel berkontribusi terhadap SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 5 (Kesetaraan Gender), dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Dominasi lima tujuan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama program pengabdian di Indonesia masih berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan kelompok rentan. Hal ini sesuai dengan karakteristik pembangunan nasional yang masih berupaya mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing masyarakat.

Namun demikian, hanya sekitar 38% artikel yang telah menyusun indikator pengukuran yang secara langsung mengacu pada target SDGs tertentu. Sebagian besar penelitian masih menggunakan indikator keberhasilan internal, seperti jumlah

peserta, peningkatan pengetahuan, atau kepuasan masyarakat, tanpa menghubungkannya dengan indikator pembangunan global. Kondisi ini menyebabkan kontribusi nyata program terhadap pencapaian SDGs sulit diukur secara komprehensif serta menyulitkan proses evaluasi dampak jangka panjang. Sebagai contoh, penelitian Kartika (2026) mengenai pemberdayaan petani menunjukkan bahwa program pendampingan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sebesar 32–40% serta meningkatkan pendapatan petani hingga 38%. Secara substantif, capaian tersebut memberikan kontribusi langsung terhadap SDG 2 melalui peningkatan ketahanan pangan dan SDG 8 melalui peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Namun demikian, sebagian besar penelitian belum melakukan pemetaan terhadap indikator SDGs yang relevan sehingga kontribusi tersebut hanya disampaikan secara deskriptif tanpa dukungan evaluasi berbasis target pembangunan.

Pada aspek pendidikan, berbagai artikel menunjukkan bahwa implementasi Program Kampus Mengajar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan literasi, numerasi, kemampuan berpikir kritis, serta motivasi belajar siswa sekolah dasar. Mesra (2026) menjelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa sebagai mitra guru memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, khususnya pada sekolah-sekolah dengan keterbatasan tenaga pendidik. Meskipun demikian, tantangan pembangunan pendidikan secara nasional masih cukup besar. Siahaan *et al.* (2023) melaporkan bahwa angka kelulusan pendidikan menengah masih berada di bawah 70%, angka partisipasi pendidikan tinggi baru mencapai 30,28% dari target 36,73%, sedangkan persentase guru bersertifikasi baru mencapai 46,15% dari target 77,2%. Data tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan berbagai program pengabdian masyarakat di tingkat lokal belum cukup untuk mengatasi persoalan pendidikan secara nasional apabila tidak didukung oleh kebijakan pemerintah yang lebih terintegrasi, pendanaan yang memadai, serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan.

Tantangan Struktural dan Kultural

Berdasarkan hasil sintesis literatur, tantangan implementasi kolaborasi dapat dikelompokkan ke dalam aspek struktural dan kultural. Hambatan yang paling banyak ditemukan adalah perbedaan orientasi akademik dan kebutuhan praktis masyarakat, yang muncul pada sekitar 80% artikel. Perguruan tinggi cenderung menekankan aspek ilmiah, inovasi, dan publikasi akademik, sedangkan masyarakat lebih membutuhkan solusi yang sederhana, cepat, murah, dan sesuai dengan kondisi lokal. Perbedaan orientasi tersebut sering kali menyebabkan kesenjangan antara desain program dengan kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, 67% artikel melaporkan lemahnya mekanisme koordinasi antarlembaga. Koordinasi sering berlangsung secara informal tanpa adanya standar operasional, pembagian tugas yang jelas, maupun sistem dokumentasi yang terintegrasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi kegiatan, tumpang tindih program, bahkan konflik kewenangan antaraktor yang terlibat. Sebanyak 71% artikel juga menunjukkan bahwa

pendekatan top-down masih mendominasi proses perencanaan. Program lebih banyak dirancang berdasarkan agenda institusi dibandingkan aspirasi masyarakat. Akibatnya, masyarakat kurang memiliki rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program sehingga tingkat keberlanjutan menjadi relatif rendah. Selanjutnya, 62% artikel mengidentifikasi adanya ketimpangan distribusi sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan, teknologi, maupun kapasitas sumber daya manusia. Daerah yang memiliki akses terhadap perguruan tinggi besar umumnya memperoleh dukungan yang lebih baik dibandingkan wilayah terpencil. Di sisi lain, 56% artikel mengungkapkan masih adanya kesenjangan literasi digital yang membatasi pemanfaatan teknologi sebagai media pemberdayaan masyarakat.

Diana dan Hakim (2021) menambahkan bahwa terdapat perbedaan budaya organisasi antara perguruan tinggi dengan dunia industri maupun masyarakat. Akademisi sering dipersepsikan terlalu teoritis, sementara pelaku industri maupun masyarakat lebih menekankan hasil praktis yang dapat langsung diterapkan. Perbedaan perspektif tersebut menjadi salah satu hambatan dalam membangun kemitraan yang efektif. Sebaliknya, penelitian Yuwono *et al.* (2025) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi lokal sejak tahap perencanaan mampu meningkatkan legitimasi program sekaligus memperkuat komitmen masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kegiatan. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan (*trust*), komunikasi, dan modal sosial di tingkat komunitas.

Peluang dan Arah Penguatan Kolaborasi

Di tengah berbagai tantangan tersebut, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi penguatan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dan sektor swasta. Pemanfaatan platform digital, sistem informasi berbasis web, *e-commerce*, media sosial, *smart farming*, maupun aplikasi pendampingan daring memungkinkan komunikasi antarlembaga berlangsung lebih cepat, transparan, dan efisien. Darmasetiawan dan Santoso (2023) menjelaskan bahwa digitalisasi mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi, pasar, layanan keuangan, hingga jejaring kemitraan sehingga proses pemberdayaan menjadi lebih inklusif. Program Kedaireka melalui skema Matching Fund juga menunjukkan bahwa kolaborasi yang didukung kebijakan pemerintah mampu mempercepat hilirisasi hasil penelitian. Akbari dan Bustami (2024) melaporkan bahwa program tersebut telah memfasilitasi lebih dari dua ribu kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri sehingga inovasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara lebih luas untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa model Pentahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, mampu menghasilkan dampak yang lebih komprehensif dibandingkan pola kemitraan konvensional. Menurut Lestarringsih dan Chrismartin (2025), keterlibatan media mempercepat penyebaran informasi, memperluas partisipasi masyarakat, serta

meningkatkan transparansi pelaksanaan program. Kolaborasi lima unsur tersebut juga memperkuat keberlanjutan program karena setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi sesuai kapasitas masing-masing.

Berdasarkan hasil sintesis seluruh literatur, terdapat beberapa strategi yang dapat memperkuat ekosistem kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi. Strategi tersebut meliputi penyusunan perencanaan berbasis aset dan kebutuhan masyarakat secara partisipatif, penguatan kelembagaan lokal melalui BUMDes, koperasi, dan kelompok masyarakat, percepatan digitalisasi yang disertai peningkatan literasi digital, integrasi nilai religius serta kearifan lokal dalam desain program, penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis pembelajaran (*learning-based evaluation*), peningkatan kompetensi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pendampingan masyarakat, serta percepatan hilirisasi inovasi melalui pengembangan *technopark* dan pusat inovasi berbasis potensi lokal. Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu menghasilkan model kolaborasi yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan sehingga kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional maupun pencapaian Sustainable Development Goals dapat semakin optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi memiliki peran yang strategis dalam mendukung pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Meskipun demikian, efektivitas implementasi kolaborasi masih berada pada kategori sedang dengan rata-rata skor 3,2. Keberhasilan program lebih banyak terlihat pada peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam jangka pendek, sedangkan keberlanjutan program, kesetaraan peran antarpemangku kepentingan, serta dampak jangka panjang masih menjadi tantangan utama. Hasil penelitian juga mengidentifikasi bahwa perbedaan orientasi antaraktor, lemahnya koordinasi, pendekatan yang masih bersifat *top-down*, ketimpangan sumber daya, dan kesenjangan digital merupakan faktor-faktor yang menghambat optimalisasi kolaborasi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan dari program yang berorientasi pada kegiatan jangka pendek menuju pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan kemitraan melalui model pentahelix, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi nilai-nilai lokal diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengabdian kepada masyarakat sehingga memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional.

REFERENSI

Akbari, T. T., & Bustami, M. R. (2024). Exploring Leadership in Kedaireka Ecosystem Programs as a Matchmaking Platform Between Universities and

- Darmasetiawan, N. K., & Santoso, H. W. (2022, December). Collaborative Strategy to Maintain Sinona Indonesia's Financial and Operational Sustainability in the New Normal Era. In *Proceedings of the 19th International Symposium on Management (INSYMA 2022)* (pp. 287-294). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-008-4_38
- Diana, D., & Hakim, L. (2020). Strategi kolaborasi antara perguruan tinggi, industri dan pemerintah: tinjauan konseptual dalam upaya meningkatkan inovasi pendidikan dan kreatifitas pembelajaran di perguruan tinggi. *Prosiding konferensi nasional ekonomi manajemen dan akuntansi (KNEMA)*. (pp. 1-14).
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations. *Research policy*, 29(2), 109-123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Firjatullah, M., Aisyah, S., Putri, S. A., Fajar, K., & Padang, I. A. R. (2026). Implementasi Model Kolaborasi Partisipatif dalam Pengabdian Masyarakat: (Studi Kasus Integrasi Program Edukasi dan Religius untuk Peningkatan Kapasitas SDM di Desa Sugihen). *Safari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 6(1), 46-59. <https://doi.org/10.56910/safari.v6i1.3409>
- Kartikaa, W. (2026). Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Kusnadi, K., Astuti, M., & Hidayah, I. (2022, September). Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Instansi Pemerintah dalam kegiatan Praktek Magang menggunakan program link and match guna menciptakan SDM Unggul. In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana* (Vol. 5, No. 1, pp. 595-598).
- Lestariningsih, T., & Chrismartin, P. Y. (2025). Model Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Durensewu Pandaan. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, 6(2), 124-133. <https://doi.org/10.30596/jisp.v6i1.22276>
- Mayrudin, Y. M. A., Indriyany, I. A., Hikmawan, M. D., & Prastio, L. O. (2024). Eksistensi Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat Perempuan di Kelurahan Kadumerak, Pandeglang, Banten. *Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://dx.doi.org/10.31506/komunitas:jpkm.v4i1.26747>
- Mesra, R. (2026). Kolaborasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Sekolah Dasar: Refleksi Program Kampus Mengajar sebagai Wujud Pengabdian Masyarakat. *Collaborative: Journal of Community Service*, 2(2), 61-77. <https://doi.org/10.64924/bpdsa019>
- Mukhlis, B. M. (2018). Kolaborasi antara universitas, industri dan pemerintah dalam meningkatkan inovasi dan kesejahteraan masyarakat: Konsep, implementasi dan tantangan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 1(1), 5. <https://doi.org/10.7454/jabt.v1i1.27>

- Qorib, F. (2024). Tantangan dan Peluang Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam Program Pengabdian di Indonesia. *Journal of Indonesian Society Empowerment*, 2(2), 46–57. <https://doi.org/10.61105/jise.v2i2.119>
- Rahmawati, A., Rinny, S., & Rahmi, S. (2024). Peran Kolaborasi dalam Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektual Indo-MathEdu*, 5(6), 8161-8175. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.2273>
- Siahaan, R. L. M., Arianti, J., & Thalib, N. (2023). Perkembangan pendidikan berkualitas di indonesia: Analisis sdgs 4. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(2), 975-985. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.316>
- Sururi, A., Hasanah, B., Ma'lumatiyah, M., & Dwianti, A. (2022). Efektivitas implementasi pemberdayaan masyarakat di lingkungan perguruan tinggi dalam mendukung dampak pembangunan berkelanjutan. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 150-162. <https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.64931>
- Yuwono, I., Sardiyo, S., Rahmanti, V. N., Putri, N. P., Rakhmawati, N. E., Yuwanti, D., ... & Sari, O. H. (2025). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Pinang Melalui Pembentukan Desa Binaan Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 6(3), 1196-1220. <https://doi.org/10.26874/jakw.v6i3.836>